



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia dewasa ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan seluruh sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan. Kondisi yang mempengaruhi bidang pendidikan adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam hal penyelenggaraan sistem pendidikan, terutama untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pada jalur pendidikan luar sekolah juga tak terkecuali, keterbatasan dukungan dana dari anggaran rutin pemerintah merupakan kendala utama bagi unit-unit pelaksana teknis bidang pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di masyarakat.

Untuk menyelamatkan program yang sedang berlangsung di masyarakat, penyelenggara pendidikan meniasati dampak krisis tersebut dengan berbagai cara seperti : memperpendek masa belajar, memperkecil jumlah pertemuan dengan warga belajar atau mengurangi sarana belajar. Karena itu, dalam segala keterbatasan, pelaksana kegiatan pendidikan kurang memperhitungkan mutu kegiatan belajar. Keterbatasan anggaran sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, juga mempengaruhi penyediaan sumber belajar dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, seperti pengelola program, fasilitator, tutor dan pelatih di masyarakat.

Salah satu isu kritis kondisi di atas adalah bagaimana mengembangkan perencanaan program pembelajaran dalam konteks pendidikan luar sekolah yang bertumpu pada partisipasi secara otonom dari pihak masyarakat. Kondisi itu meningkatkan tuntutan, yaitu perencana pendidikan di masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan fungsi untuk merancang program yang bermutu, tetapi juga harus mendesain program yang sangat efisien dengan melibatkan keikutsertaan masyarakat atas dasar sukarela, mengingat kemampuan pemerintah yang amat terbatas.

Disamping sebagai dampak langsung dari krisis ekonomi, alokasi anggaran bidang pendidikan juga dipengaruhi oleh persepsi pimpinan politik dan pemerintahan yang umumnya masih menganggap pendidikan sebagai institusi yang belum penting dibanding dengan : institusi ekonomi, politik dan pertahanan. Santoso (2000:9), mengemukakan bahwa : “Persepsi tersebut berpengaruh terhadap penentuan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan, terbukti RAPBN untuk tahun anggaran 2000 tidak lebih dari 3,8 (tiga koma delapan) persen dari total pengeluaran pemerintah.” Sehingga masyarakat pendidikan harus mengubah pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan hanyalah institusi charity yang tidak mengejar keuntungan, karena pandangan tersebut akan mempersulit perencanaan pendidikan di tingkat regional atau lokal untuk menyusun program yang berkualitas.

Salah satu aspek yang dapat menjadi kriteria utama dalam menyusun perencanaan pendidikan di masa krisis saat ini adalah penyelenggaraan

program pembelajaran yang mampu menjawab tantangan dan masalah ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan yang efisien dalam hal waktu dan biaya, dapat dianggap sebagai alternatif untuk menjawab masalah tersebut. Disamping itu seorang perencana pendidikan, harus memikirkan dampak positif dari keluaran pendidikan terhadap pemecahan masalah ekonomi, sekalipun dalam ruang lingkup mikro, seperti peningkatan pendapatan dan menumbuhkembangkan kegiatan produksi di masyarakat.

Apapun jenis dan jenjang pendidikan yang direncanakan, suatu proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh perkembangan industrialisasi modern, menurut Tilaar (1992: 78), harus mampu mencerminkan: “(1) mementingkan kualitas; (2) mengutamakan persaingan untuk menciptakan kualitas; (3) menghilangkan nilai-nilai primer paguyuban, seiring dengan itu munculnya nilai-nilai megapolis; (4) kesatuan dalam keragaman budaya semakin meningkat; (5) meningkatkan kualitas hidup yang lebih merata dengan terpenuhinya kebutuhan dasar; dan (6) tata nilai baru seperti intelektual kreatif, hedoisme dan individualisme yang menyertai masyarakat industri.”

Tak dapat dipungkiri bahwa tatanan global yang ditandai dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi, berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Dilain pihak keterbatasan daya dukung pendidikan menuntut adanya perencanaan yang didasari oleh kepentingan lokal. Untuk memadukan kedua tuntutan tersebut, perencanaan pendidikan dan latihan jangka pendek yang sesuai dengan kondisi awal abad 21 harus berpijak pada dua prinsip pokok (Tilaar, 1999:105), yaitu : “ sifatnya yang komprehensif, dan bersifat

dinamik.” Sifat komprehensif menuntut perencanaan yang memadukan antara tuntutan pasar dengan strategi pembangunan yang lebih luas. Sedangkan sifat dinamis, menuntut perencana untuk mendengar, melihat, membaca, menyuarakan dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Sedangkan perencanaan pendidikan dan yang dibutuhkan masyarakat masa depan, menurut Tilaar (1999:106) adalah ; “ perencanaan yang didorong oleh mekanisme pasar (market driven) yang berarti pula mendapat self-suport dari masyarakat yang utuh. Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu visi pendidikan dan pelatihan yang jelas dalam mengakomodasikan dinamika transformasi sosial ekonomi masyarakat.”

Pendapat di atas mengandung pengertian bahwa, penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan selalu dipengaruhi dan harus berpengaruh terhadap proses sosial di masyarakat. Proses sosial yang dinamis ditandai dengan transformasi sosial yang merangsang lahirnya inovasi. Difusi dan adopsi inovasi menuntut penguasaan pengetahuan, kerampilan dan sikap produktif.

Krisis ekonomi telah berdampak terhadap tatanan kehidupan bernegara. Salah satu isu sentral yang berkembang adalah percepatan reformasi yang memfasilitasi perimbangan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dasar pemikiran tuntutan tersebut, adalah untuk meningkatkan daya dukung dan dinamika masyarakat yang berbasis pada keswadayaan lokal.

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagai dasar penyelenggaraan, Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah (pasal 11) menyebutkan bahwa: "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten atau daerah Kota meliputi : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan tenaga kerja." Pasal tersebut secara implisit menyatakan, bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan wewenang pemerintah Daerah. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dan dikoordinasi oleh lembaga teknis di daerah, yaitu Badan pendidikan dan pelatihan (pasal 65 dan penjelasannya). Lebih lanjut dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999 (penjelasan) disebutkan bahwa, " hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)." Sehingga masyarakat memiliki peluang yang besar untuk menentukan keberhasilan program dan sekaligus merupakan tanggungjawab baru yang harus dilaksanakan sebagai anggota masyarakat dalam suatu daerah.

Otonomi daerah menuntut masyarakat secara aktif memanfaatkan kesempatan kerjasama regional dalam memenuhi kebutuhan yang semakin

bervariasi, mendasar dan sesuai dengan kondisi nyata mekanisme pasar. Sistem pemerintahan harus didukung oleh lembaga masyarakat yang self-suport, yaitu memanfaatkan daya dukung dan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah daerah, dalam konteks pendidikan dan latihan, Tilaar (1999:111) menyarankan bahwa dalam perencanaan pendidikan dan latihan harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yaitu : "Perencanaan pelatihan yang efektif harus memuat tentang penguasaan ilmu dan penerapannya, sesuai dengan dinamika, menghasilkan inisiatif lahirnya kemampuan baru dan menggunakan strategi cyber learning. Perencanaan pelatihan yang efisien dilandasi dengan gross root planing, mengandalkan networking dan teamworking, didukung oleh riset kebijakan dan data tentang masalah yang dihadapi." Kedua kriteria tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan perencanaan yang produktif dan memiliki keunggulan dalam pemenuhan kebutuhan pelatihan obyektif suatu daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pelatihan bagi calon pengusaha Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain, kondisi obyektif yang merupakan sumber masalah adalah : perkembangan aspek demografis di sekitar pusat pemerintahan daerah, peran ibu di rumahtangga dan peran sosial ekonomi di luar rumah, serta aspek sosiokultural yang berkembang di masyarakat Sumenep.

Aspek demografis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lokasi yang memang disediakan untuk kawasan pemukiman baru di daerah

perkotaan, yang juga sebagai pusat pemerintahan. Secara geografis, beberapa lokasi perumahan dianggap strategis, karena : berdekatan dengan pusat pemerintahan, perdagangan dan layanan sosial. Dari segi ekonomis, memberi peluang untuk menciptakan kegiatan produktif, kepemilikan rumah dengan menggunakan fasilitas kredit dan merupakan investasi jangka panjang. Sedangkan secara sosiokultural, merupakan kawasan tempat tinggal yang cocok bagi masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda (multiculture), memiliki daya dukung mobilitas sosial akibat kesadaran sosial dan tingkat pendidikan yang tinggi, berdekatan dengan sarana umum, pemerintahan dan pusat layanan sosial.

Berdasarkan data yang ada di Kantor Kecamatan Sumenep, di wilayah tersebut terdapat 9 (sembilan) lokasi pemukiman, 3 (tiga) diantaranya merupakan wilayah Desa Kolor (Agustus 2000). Tiga lokasi Perumahan tersebut adalah Kolor Indah, Bumi Sumekar Asri dan Satelit Permai.

Data kependudukan Desa Kolor (Agustus 2000), menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak : 7.277 orang, 4.112 orang (56,5 %) diantaranya bertempat tinggal di tiga lokasi perumahan tersebut. Pada tiga permukiman tersebut, terdapat 1.371 kepala keluarga, 621 (45,3 %) diantaranya adalah pasangan suami istri yang keduanya bekerja di luar rumah., dan pada lokasi tersebut juga terdapat 309 anak berusia dibawah 5 (lima) tahun (Balita). Ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah, umumnya sebagai pegawai negeri sipil dan pekerja pada sektor jasa perdagangan.

Motivasi ibu rumah tangga bekerja diluar rumah disebabkan oleh keinginan untuk menjadi wanita karier, tuntutan ekonomi keluarga dan budaya malu apabila menganggur di rumah. Peran sebagai ibu rumahtangga banyak dimainkan oleh pembantu rumahtangga. Kondisi sosial tersebut merupakan gaya hidup yang dipengaruhi oleh peradaban yang dianggap modern, berkembangnya institusi sosial (lembaga, yayasan) yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga (mengasuh dan mendidik anak), dan banyak tersedia tenaga kerja murah.

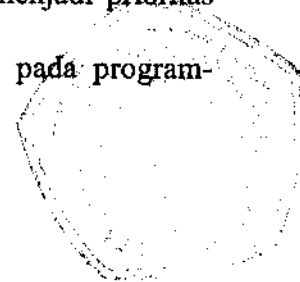
Dalam konteks pendidikan, kondisi di atas merupakan daya dukung pembangunan daerah, namun juga merupakan awal masalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai masalah apabila, perhatian dan penanaman dasar-dasar pendidikan yang seharusnya diberikan oleh orangtua pada usia dini tidak lagi diberikan. Kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan semakin tinggi, tanpa memperhitungkan kondisi internal lembaga, seperti sarana bermain, ratio jumlah pengasuh dengan jumlah siswa dan kesesuaian program pembelajaran dengan tahap-tahap perkembangan anak secara individual.

Beberapa program pembinaan anak usia dini yang ada di desa Kolor, antara lain : 2 (dua) lokasi Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) lokasi Tempat Penitipan Anak (TPA) , 1 (satu) lokasi Kelompok Bermain dan 2 (dua) pusat layanan Posyandu. Keterbatasan daya tampung, fasilitas dan tenaga pengasuh pada 2 (dua) Taman Kanak-Kanak tersebut mengakibatkan banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya jauh dari tempat tinggal. Permintaan

masyarakat terhadap layanan Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain semakin meningkat, namun kemampuan layanan yang dapat diberikan lembaga tersebut sangat terbatas. Masalah intern yang dihadapi Tempat Penitipan Anak adalah : keterbatasan daya tampung, jumlah pengasuh terbatas dan pengelolaan yang masih mementingkan fungsi sosial daripada kepentingan ekonomis. Sedangkan pada Kelompok bermain, pengorganisasian kegiatan masih menyatu dengan Taman Kanak-Kanak, sulit mendapatkan tenaga berpengalaman dalam mengasuh anak usia dini dan belum menemukan jaringan kerja untuk mengembangkan layanan yang lebih profesional.

Berbagai keterbatasan tersebut, belum sepenuhnya disadari oleh pengelola program ataupun masyarakat pengguna jasa. Hal tersebut dapat disebabkan oleh : kurang terpadunya perhatian lembaga pemerintah yang menangani pendidikan anak usia dini, keterbatasan anggaran pada instansi pemerintah, pengelola program tidak secara proaktif dan terbuka berusaha mengembangkan layanannya, serta belum ditemukanya penghubung sumber yang secara profesional dapat membantu pemecahan masalah tersebut

Salah satu lembaga pemerintah yang banyak memperhatikan masalah tersebut adalah Sanggar Kegiatan Balajar (SKB). Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan penanganan program anak usia dini belum menjadi prioritas utama, karena jaringan kerja lintas sektoral masih terbatas pada program-program pemasalan yang sudah ditentukan oleh pusat.



Atas dasar kondisi di atas, yaitu dampak krisis ekonomi terhadap kemampuan pembiayaan program pendidikan di masyarakat, otonomi daerah yang harus menggalakkan peran serta masyarakat, latar belakang masalah dalam pendidikan anak usia dini dan penegasan Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991, yang pada BaB IV pasal 5 menyatakan bahwa : “penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah dapat dilaksanakan oleh masyarakat,” maka pelatihan bagi calon pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain secara swadaya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif program yang relevan di Sumenep.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pelatihan, merupakan salah satu upaya dan model yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah, merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam menemukan upaya baru pemecahan masalah di daerahnya. Sifat kebutuhan pelatihan yang mendesak dan jaringan kerja yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menghasikan perencanaan yang produktif untuk memenuhi kebutuhan pelatihan.

Pemilihan masalah yang terfokus pada partisipasi masyarakat untuk mendukung program pelatihan secara swadaya ini merupakan masalah aktual dan memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh sosiaekonomi dan kultural suatu daerah. Penelitian pada kasus Perencanaan Pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ini, peneliti berharap dapat mendiskripsikan secara utuh proses perencanaan yang mengandalkan keswadayaan masyarakat dalam pembiayaan pelatihan sebagai salah satu model pelatihan yang cocok untuk mengatasi masalah multi dimensi di daerah Sumenep.

B. Pembatasan Masalah

Model pelatihan partisipatif merupakan salah satu model pelatihan terpilih yang banyak digunakan oleh lembaga pelatihan. Model partisipatif dianggap unggul karena lebih banyak menimbulkan keterlibatan antar unsur-unsur dalam kegiatan pelatihan. Keterlibatan peserta dalam semua langkah kegiatan pelatihan menjadi salah satu ciri penerapan model pelatihan partisipatif.

Sudjana (1993:129) menjelaskan bahwa kegiatan belajar partisipatif memiliki prinsip: "Berdasarkan kebutuhan belajar, berorientasi pada tujuan belajar, berpusat pada warga belajar dan belajar dari pengalaman." Keempat prinsip tersebut lebih mengarah pada pendekatan pembelajaran yang bersifat andragogis, demokratis dan berpusat pada potensi peserta pelatihan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan peserta didik terhadap tugas yang dihadapi maupun terhadap peningkatan pendapatan pada masa mendatang, mereka dipandang perlu diberikan suatu kekuatan untuk membangkitkan upaya tersebut ataupun dukungan dari luar komponen inti pelatihan. Pemberian kekuatan dapat berupa motivasi, upaya menimbulkan kesadaran dari dalam diri untuk memahami perubahan ataupun berupa rencana tindak lanjut program yang telah diikuti.

Kindervatter (1979), sehubungan dengan konsep empowering process mengemukakan bahwa: "*People gaining and understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society*". Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa pemberian

kekuatan atau pemberdayaan adalah setiap upaya dalam pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Berangkat dari pendapat di atas, peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan calon pengasuh TPA dan Kelompok Bermain ini adalah kelompok belajar pada usia dewasa yang memerlukan perhatian khusus. Karakteristik peserta didik yang termasuk orang dewasa yang perlu diperhatikan adalah karakteristik sosiologis, psikologis dan sosial (Sudjana, NAPCAE, 1974: 19).

Latar belakang pendidikan yang bervariasi disiplin ilmunya, pengalaman sebelum mengikuti pelatihan dan status sosial ekonomi yang berbeda, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat melakukan jenis pekerjaan yang serupa. Secara kodrati, jenis kelamin perempuan diharapkan lebih gampang untuk menguasai jenis keterampilan dan pengetahuan yang diberikan selama proses pelatihan.

Dalam mengupayakan pencapaian harapan di atas, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang merangsang kesadaran diri yang lebih tinggi. Keikutsertaan tokoh masyarakat di sekitar pengguna jasa program ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pelatihan. Pada lokasi penelitian, antara tokoh masyarakat formal dan informal memiliki peluang yang sama sebagai kunci pembuka keswadayaan masyarakat dalam pendanaan.

Kegiatan pelatihan swadaya dalam pendanaan ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak yang berkepentingan terhadap calon output pelatihan, keyakinan semua pihak yang terlibat dalam pelatihan, dan kesadaran bahwa masalah-masalah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan pelatihan juga merupakan masalah dalam lingkup sistem sosialnya.

Atas dasar alasan di atas, maka fokus penelitian ini adalah proses terjadinya perencanaan pelatihan yang berbasis pada keswadayaan masyarakat dalam pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengasuh satuan pendidikan luar sekolah yang membina anak usia dini. Beberapa masalah yang berhubungan dengan fokus penelitian tersebut adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gagasan untuk mengadakan pelatihan yang mengandalkan keswadayaan dalam pembiayaan, bentuk jaringan kerja sebagai dasar kerja tim perencana untuk menghasilkan perencanaan yang siap dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelatihan, langkah-langkah tim perencana dalam melaksanakan perencanaan pelatihan, dan wujud partisipasi masyarakat dalam pendanaan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

Penelitian ini hanya memfokuskan pada proses perencanaan pelatihan. Sehingga, peneliti tidak berusaha lebih jauh untuk mengetahui bagaimana proses pelatihan secara keseluruhan dan sejauh mana dampak pelatihan ini terhadap kinerja ataupun produktivitas peserta pelatihan setelah menyelesaikan program belajarnya.

Keutuhan perencana dalam sebuah tim diharapkan dapat melaksanakan fungsi perencanaan seoptimal mungkin, merupakan proses belajar antar anggota tim dan wujud jaringan kerja antar organisasi yang ada di masyarakat.

Untuk mendapatkan data yang lengkap, penelitian ini juga didukung informasi dari pelatih ataupun tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelatihan. Keterlibatan tokoh dan anggota masyarakat dalam perencanaan pelatihan merupakan salah satu kunci sukses pelatihan. Hal ini disebabkan oleh pemilihan model partisipatif sebagai wujud perencanaan kegiatan sosial yang mengandalkan keswadayaan dalam pendanaan.

C. Rumusan Masalah

1. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana proses terjadinya perencanaan pelatihan partisipatif sebagai salah satu jenis perencanaan sosial di masyarakat yang berdampak terhadap keswadayaan dalam pembiayaan pelatihan bagi Calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep?”

2. Pertanyaan Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang mengacu pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelatihan ini, melibatkan lembaga pemerintah, institusi atau yayasan sosial, tokoh masyarakat dan

peserta pelatihan yang pada awalnya belum tentu menyadari masalah yang dihadapi. Pemahaman dan kesadaran sumber daya organisasi dan sistem sosial yang ada di masyarakat terhadap makna pelatihan berpengaruh terhadap proses perencanaan pelatihan. Jaringan kerja perencana pelatihan yang berasal dari berbagai organisasi sosial, menjadi tumpuan utama penentuan langkah-langkah perencanaan dalam upaya menghasilkan desain pelatihan yang sesuai dengan kondisi lokal. Unjuk kerja sebagai tim perencana (teamwork) diharapkan dapat mempermudah dalam menjaring data, mendapatkan daya dukung pelatihan dan menghasilkan solusi efektif untuk mengatasi masalah yang multidimensi.

Untuk mendapatkan data yang obyektif, relevan dan aktual, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Faktor apa saja yang mendukung gagasan penyelenggaraan pelatihan secara swadaya dalam pembiayaan bagi Calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?
- b. Bagaimana bentuk jaringan kerja tim perencana sebagai dasar pelaksanaan tugas perencanaan pada pelatihan bagi Calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?
- c. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan tim perencana dalam menyiapkan pelaksanaan pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?

d. Apa saja wujud partisipasi masyarakat dalam membiayai pelatihan Calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?

Perbedaan konsisi sosial, ekonomi dan kultural, berpeluang besar mendasari munculnya gagasan untuk mengadakan kegiatan atau perubahan pada sistem sosialnya. Langkah-langkah perencanaan pelatihan merupakan gambaran unjuk kerja tim perencana dalam merencanakan kegiatan pelatihan. Hasil kerja tim perencana pelatihan dapat dilihat dari desain pelatihan dan ketersediaan daya dukung pelatihan. Atas dasar kondisi pada lokasi penelitian, jaringan kerja yang mungkin terbentuk adalah bersifat fungsional, insidental dan tidak berorientasi pada kepentingan ekonomis. Kondisi masyarakat dan kemampuan yang dimiliki organisasi sosial di masyarakat sangat memungkinkan perbedaan besar kecilnya partisipasi, jenis atau bentuk partisipasi dan latar belakang atau alasan untuk berpartisipasi.

D. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pelatihan di masyarakat dalam merancang dan melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan latar belakang masalah pelatihan, model pelatihan yang diggunakan, karakteristik peserta dan daya dukung pelatihan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendasari gagasan penyelenggaraan pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?
2. Mendiskripsikan bentuk jaringan kerja sebagai dasar pelaksanaan fungsi perencanaan pada pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok bermain di Kabupaten Sumenep?
3. Mendiskripsikan langkah-langkah perencanaan yang dilakukan tim perencana dalam menyiapkan proses pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?
4. Mendiskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pelatihan bagi calon Pengasuh Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain di Kabupaten Sumenep ?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi kepentingan :

1. Pengembangan teori pelatihan, khususnya dalam penerapan model pelatihan partisipatif di masyarakat yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan budaya tertentu. Deskripsi obyektif hasil penelitian merupakan gambaran penerapan model pelatihan partisipatif yang mengandalkan keswadayaan pendanaan oleh masyarakat.

2. Kepentingan praktis, yaitu bagi:
 - a. Perencana pelatihan di masyarakat, sebagai masukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pemahaman lingkungan sosial, ekonomi dan budaya sebagai faktor yang determinatif dalam perencanaan pelatihan.
 - b. Pelatih, sebagai masukan yang diharapkan mampu menggambarkan betapa kuatnya kondisi sistem sosial mempengaruhi pelaksanaan pelatihan. Sehingga secara bersama-sama berupaya meningkatkan pemahaman terhadap kondisi sistem nilai budaya di masyarakat, karakteristik sasaran pelatihan, efisiensi dan efektifitas pelatihan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat.
 - c. Penyelenggara pelatihan, sebagai salah satu masukan dalam merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang mengandalkan keswadayaan masyarakat, sesuai dengan kondisi krisis dan pergeseran fungsi lembaga-lembaga pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mengarahkan pembahasan selanjutnya, penulis mengemukakan penjelasan istilah yang terdapat dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Langkah-langkah perencanaan mengandung arti segala kegiatan yang dilakukan oleh tim perencana pelatihan secara terorganisasi untuk menghasilkan desain pelatihan dan menyiapkan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan.
2. Jaringan Kerja adalah pola hubungan antar komponen perencana sebagai dasar pelaksanaan fungsi sebagai perencana pelatihan. Jaringan kerja berfungsi untuk memerinci tugas anggota tim perencana orang yang terlibat dalam perencanaan pelatihan.
3. Tim perencana pelatihan mengandung arti sekelompok orang yang karena kepentingan, tugas dan fungsinya menjadi satu kesatuan yang secara bersama-sama menyusun perencanaan pelatihan, menyiapkan dayadukung pelatihan dan mengupayakan pemecahan masalah yang menghambat proses perencanaan pelatihan.
4. Swadaya adalah melakukan kegiatan atas dasar kemampuan sendiri. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan dapat berwujud finansial, waktu, pemikiran dan fasilitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan.
5. Pelatihan partisipatif adalah upaya sumber belajar untuk mengikutsertakan warga belajar dalam seluruh kegiatan pembelajaran (Sudjana, 1993: 117). Dalam penelitian ini istilah partisipatif tidak hanya dibatasi oleh hubungan antara sumber belajar dan warga belajar, tetapi juga komponen lain seperti calon pengguna output latihan, pemberi dana dan pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pelatihan.

6. Tempat Penitipan Anak adalah suatu tempat yang dikelola oleh yayasan atau perorangan, memiliki fasilitas dan tenaga pengasuh yang atas dasar kesepakatan tertentu memberikan layanan jasa bidang pendidikan anak usia tertentu dan pada jangka waktu tertentu.
7. Kelompok bermain adalah wadah atau satuan pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh yayasan atau perorangan, berfungsi dalam membimbing dan memfasilitasi perkembangan anak usia pra sekolah atas dasar kesepakatan antara orang tua dan pihak pengelola jasa.

G. Kerangka Pemikiran

Pelatihan merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang dilaksanakan di jalur pendidikan luar sekolah. Secara fungsional, komponen pendidikan luar sekolah meliputi masukan mentah, masukan sarana, masukan lingkungan, proses, keluaran, masukan lain dan masukan pengaruh (Sudjana, 1993: 32).

Hubungan fungsional dalam pendidikan luar sekolah mengandung makna bahwa pelatihan bukan merupakan suatu program yang berdiri sendiri. Suatu program latihan didasari atas masalah yang diharapkan terpenuhi melalui pelatihan, melibatkan sumber dan daya dukung organisasi, masyarakat serta faktor-faktor lain yang berpengaruh. Sehingga hubungan fungsional ini menjadi dasar dalam membentuk jaringan kerja yang diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan.

Dalam konsep proses pemberdayaan (*Empowering Process*), kegiatan pendidikan merupakan upaya yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. Djudju Sudjana (1993:63) mengemukakan bahwa pembelajaran dalam pemberian kekuatan atau pemberdayaan mempunyai delapan pokok, yang meliputi: “belajar dilakukan dalam kelompok kecil, pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada warga belajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung, kepemimpinan kelompok diperankan oleh warga belajar, sumber belajar bertindak sebagai fasilitator, proses belajar bersifat demokratis, adanya kesatuan langkah dalam pencapaian tujuan, menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pada warga belajar, bertujuan akhir untuk meningkatkan status sosial ekonomi warga belajar dalam masyarakat”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu proses untuk meningkatkan status sosial ekonomi warga belajar dalam sistem sosial tertentu.

Senada dengan konsep di atas, Conyers (1982:156) mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan salah satu perencanaan sosial, sehingga dalam proses perencanaan harus melakukan : “ (1) survey dan konsultasi lokal; (2) penggunaan staf yang terampil; (3) bersifat desentralisasi, dan berpijak pada (5) community development.” Perndapat tersebut memandang penting kebutuhan lokal yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Perkembangan teknologi pendidikan, khususnya di bidang pendidikan luar sekolah memandang bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang lebih andragogis dan melibatkan peserta belajar dalam semua langkah kegiatan mempermudah proses transformasi kebutuhan belajar yang diperlukan peserta pelatihan. Sudjana (1993: 129) mengemukakan bahwa kegiatan belajar partisipatif memiliki prinsip:

“(1) berdasarkan kebutuhan belajar (*Learning Needs Based*); (2) berorientasi pada tujuan kegiatan belajar (*Learning Goal and Objectives Oriented*); (3) berpusat pada warga belajar (*Participant Centered*), dan (4) berdasarkan pengalaman (*Experiential Learning*).”

Prinsip-prinsip tersebut merupakan acuan dasar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Namun masih sedikit sekali penyelenggara pelatihan di masyarakat yang secara menyeluruh mendayagunakan daya dukung yang dimiliki peserta pelatihan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelatihan dan tokoh yang senantiasa ikut bertanggung jawab terhadap masalah dalam sistem sosial.

Sehingga dalam penelitian ini konsep partisipatif tidak hanya dilihat dari proses pembelajarannya, tetapi menterjemahkan konsep partisipatif dalam penyelenggaraan. Tugas seorang perencana tidak hanya berakhir sampai dengan diluncurkannya desain pelatihan, tetapi perencana yang melibatkan unsur dari luar sistem, perorangan ataupun daya dukung yang ada di masyarakat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi selama pelatihan berlangsung.

Untuk mendapatkan keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut memerlukan langkah-langkah yang terarah, terorganisasi

dalam jaringan kerja dan menjaga terjalinnya hubungan baik antar semua komponen pelatihan.

Tim perencana yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki perbedaan kepentingan menimbulkan perbedaan aktivitas dalam menanggapi tugas yang sebagai anggota tim perencana. Tim perencana menjadi rapuh, apabila tidak didukung oleh kesadaran yang tinggi dan pembagian tugas yang jelas, apalagi dalam tim tersebut tidak didukung oleh dukungan dana penyelenggaraan yang memadai.

Secara organisatoris, tim perencana yang terbentuk dari beberapa unsur profesi dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh sosok kepribadian, keterhubungan dengan tugas, sikap terhadap masalah di masyarakat dan kebiasaan kerja dalam kelompok. Pemahaman terhadap ketersediaan sarana pendukung di masyarakat menimbulkan reaksi anggota perencana dalam mengupayakan alternatif pemecahan masalah. Pemilihan model pelatihan partisipatif diharapkan mempermudah dalam meningkatkan keswadayaan dan model tersebut sangat sesuai dengan karakteristik umum pada lokasi penelitian yang memiliki keunikan secara sosial, ekonomis dan kultural.

Atas dasar uraian diatas, dasar pemikiran peneliti dalam penelitian ini secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat mempengaruhi kepekaan dalam mengenal masalah yang dihadapi oleh sistem sosial itu. Kepekaan dan kesadaran terhadap suatu masalah, dapat mempengaruhi alasan keikutsertaan dalam suatu aktifitas di masyarakat.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pemecahan masalah di masyarakat, antara lain peran dan fungsi lembaga sosial yang ada di masyarakat, koherensi antar anggota dalam sistem sosial, kebijakan umum, latar belakang munculnya masalah, dan tingkat kedinamisan masyarakat.

Kedua, jaringan kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim perencana pelatihan. Pembentukan jaringan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam kegiatan perencanaan pelatihan di masyarakat, sebagai akibat berbagai keterbatasan yang ada. Rincian tugas yang jelas mempermudah dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan perencanaan dalam pelatihan.

Ketiga, Langkah-langkah perencanaan merupakan suatu tahapan yang dilewati oleh tim perencana dalam melakukan tugas dan fungsinya. Setiap langkah merupakan akumulasi aktifitas yang tidak selamanya harus bersifat kronologis. Penetapan langkah-langkah kegiatan perencanaan pelatihan dipengaruhi oleh model yang digunakan, karakteristik masalah, kondisi sosial budaya, dan perhitungan efektifitas atau efisiensi dari suatu kegiatan.

Keempat, Perencanaan pelatihan di masyarakat merupakan salah satu jenis dari perencanaan sosial. Perencanaan sosial menuntut partisipasi dari anggota masyarakat. Bentuk atau jenis partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, status sosial, dan kepentingan terhadap program yang akan dilaksanakan.